JAKSI JURNAL AKUNTANSI

Vol. 15 No. 1 (2026): April 2026

e-ISSN: 2716-3849 | p-ISSN: 2301-4075

# PENDAMPINGAN PROSES PENYUSUNAN APBDES TA-2025 DESA PARHABINSARAN JANJIMATOGU KECAMATAN ULUAN KABUPATEN TOBA

| | |
|---|---|
| **Penulis** | **Naomi Manurung*, Isnan Hari Mardika, Eko Hadi Siswanto** |
| **Institusi** | Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta |
| **Email Korespondensi** | naomimanurung08@gmail.com |

**Riwayat Naskah**

Diterima 28 September 2025

Revisi 25 Januari 2026

Rilis 25 April 2026

**Abstrak**

Pembangunan desa merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional Indonesia, di mana Dana Desa memberikan peluang bagi desa untuk merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun, Desa Parhabinsaran Janjimatogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, masih menghadapi tantangan dalam penyusunan APBDes akibat keterbatasan kapasitas perangkat desa, baik dari segi pemahaman regulasi, kemampuan administratif, maupun penguasaan teknologi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kendala serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas penyusunan APBDes melalui penguatan kapasitas perangkat desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lokal lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mampu meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola dan menyusun APBDes secara lebih akuntabel dan transparan. Kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan pemahaman teknis aplikasi, ketersediaan fasilitas pendukung, serta koordinasi antarperangkat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa untuk Penyusunan APBDes, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan kerjasama antar lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata Kunci**

***Pembangunan desa, APBDes, Perangkat Desa, SISKEUDES, Dana Desa.***

**DOI**

10.37932/ja.v15i1.981

***Abstract***

*Village development is an important pillar of Indonesia's national development, where Village Funds provide opportunities for villages to plan development according to local needs. However, Parhabinsaran Janjimatogu Village, Uluan District, Toba Regency, still faces challenges in preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) due to limited capacity of village officials, both in terms of regulatory understanding, administrative skills, and technological proficiency. This study was conducted to analyze the obstacles and provide recommendations to improve the*

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

JAKSI JURNAL AKUNTANSI

Vol. 15 No. 1 (2026): April 2026

e-ISSN: 2716-3849 | p-ISSN: 2301-4075

*effectiveness of APBDes preparation through strengthening the capacity of village officials. The research method employed a participatory and collaborative approach, involving village government, Village Consultative Body (BPD), community leaders, and other local stakeholders. The results show that the use of the Village Financial System Application (SISKEUDES) can enhance the capacity of village officials in managing and preparing APBDes in a more accountable and transparent manner. The challenges identified include limited technical understanding of the application, inadequate supporting facilities, and weak coordination among village officials. This study is expected to contribute positively to strengthening the capacity of village officials in utilizing SISKEUDES for APBDes preparation, as well as providing recommendations to reinforce inter-institutional cooperation in order to improve community welfare.*

***Keywords***

***Village development, APBDes, Village Officials, SISKEUDES, Village Fund.***

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia. Sejak bergulirnya kebijakan Dana Desa pada tahun 2015, desa memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Dana Desa telah menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Namun, efektivitas pemanfaatan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa (Susano & Rachmawati, 2024).

Desa Parhabinsaran Janjimatogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, merupakan salah satu desa dengan potensi sumber daya yang cukup besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025, desa ini menghadapi sejumlah tantangan yang mencakup keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam memahami regulasi, kemampuan administratif, serta keterampilan teknis terkait penggunaan aplikasi keuangan desa. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kualitas dokumen APBDes yang dihasilkan, tetapi juga dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa (Harahap et al., 2023).

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa merupakan faktor dominan yang menghambat tata kelola keuangan desa. Sri Nurhidayati, Syaifullah, & Muslim (2025) mengungkapkan bahwa rendahnya kapasitas teknis,

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

minimnya pelatihan, serta keterbatasan sarana pendukung menjadi penghambat implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Padahal, SISKEUDES merupakan instrumen penting yang dikembangkan pemerintah untuk mendukung pengelolaan APBDes secara lebih efektif, akuntabel, dan transparan (Atira et al., 2025). Implementasi aplikasi ini diharapkan mampu meminimalisasi kesalahan administratif sekaligus meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

Namun, efektivitas penggunaan SISKEUDES di lapangan masih menghadapi sejumlah kesenjangan penelitian. Penelitian sebelumnya menekankan pada manfaat teknis penggunaan aplikasi ini, tetapi belum banyak yang menelaah secara mendalam hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi perangkat desa di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Fadila & Pravitasari (2025), misalnya, menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan implementasi SISKEUDES, sementara penelitian Widiani & Musmini (2024) menemukan bahwa penguasaan aplikasi oleh perangkat desa masih belum merata. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif terkait peran pendampingan dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa, khususnya dalam penyusunan APBDes di desa-desa dengan kondisi serupa.

Pendampingan dalam penyusunan APBDes menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Pendampingan bukan hanya membantu perangkat desa memahami regulasi, tetapi juga meningkatkan keterampilan administratif serta kemampuan teknis dalam mengoperasikan SISKEUDES. Melalui pendampingan, perangkat desa didorong untuk belajar secara langsung (learning by doing), sehingga mampu menghasilkan dokumen APBDes yang lebih sistematis, sesuai regulasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pendampingan juga berfungsi memperkuat kolaborasi antara perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, proses penyusunan APBDes menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel (Alfiani & Estiningrum, 2021). Hal ini penting karena pembangunan desa pada dasarnya tidak hanya menyangkut aspek teknokratis, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi sosial dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pendampingan proses penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Parhabinsaran Janjimatogu, Kecamatan

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 

e-ISSN: 2716-3849 | p-ISSN: 2301-4075

Uluan, Kabupaten Toba. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat desa dalam penyusunan APBDes, (2) menilai efektivitas penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam menunjang transparansi dan akuntabilitas, serta (3) memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan APBDes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan kapasitas perangkat desa, serta menjadi referensi akademik bagi kajian mengenai pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi. Demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada penguatan tata kelola desa secara teknis, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## II. KAJIAN LITERATUR

### APBDes sebagai Instrumen Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi rujukan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. APBDes tidak hanya memuat alokasi belanja dan sumber penerimaan, tetapi juga mencerminkan prioritas pembangunan yang disepakati secara partisipatif oleh masyarakat desa melalui musyawarah (Susano & Rachmawati, 2024). Kualitas APBDes sangat menentukan efisiensi penggunaan Dana Desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lokal; APBDes yang disusun secara lemah rentan terhadap pemborosan, ketidaksesuaian program, dan rendahnya akuntabilitas (Alfiani & Estiningrum, 2021). Oleh karena itu, penyusunan APBDes harus didukung oleh kemampuan teknis aparatur, data kebutuhan yang valid, serta mekanisme partisipasi masyarakat.

### Tata Kelola Keuangan Desa

Tata kelola keuangan desa yang baik menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Beberapa studi menemukan bahwa kegagalan menginternalisasi prinsip-prinsip ini pada tingkat desa berkaitan erat dengan kapasitas SDM dan kelembagaan lokal (Harahap et al., 2023). Menurut Alfiani & Estiningrum (2021) bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan BPD meningkatkan legitimasi APBDes dan menurunkan risiko penyalahgunaan anggaran. Demikian, upaya perbaikan tata kelola desa harus menyasar

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 

aspek teknis (misalnya administrasi dan pelaporan) sekaligus aspek social kelembagaan (misalnya partisipasi dan pengawasan lokal).

**Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai Alat Pendukung**

SISKEUDES dikembangkan untuk menyediakan kerangka kerja akuntansi dan sistem pencatatan yang terstandar bagi desa, sehingga proses perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah diaudit. Penelitian empiris menunjukkan bahwa SISKEUDES mampu meningkatkan akurasi pencatatan dan keterbukaan informasi keuangan desa jika dioperasikan dengan benar (Atira, 2025). Namun, manfaat SISKEUDES tidak otomatis terealisasi efektivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur (komputer/HP dan koneksi), kebijakan dukungan daerah, serta kemampuan teknis pengelola desa.

**Kapasitas SDM Perangkat Desa**

Salah satu temuan konsisten dalam literatur adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa mulai dari pemahaman regulasi, kemampuan administratif, hingga literasi digital yang menjadi hambatan utama dalam penyusunan APBDes yang berkualitas (Widiani & Musmini, 2024). Perangkat desa yang belum terlatih cenderung mengalami kesalahan dalam klasifikasi anggaran, penginputan data pada SISKEUDES, dan pelaporan yang tidak sesuai standar. Karena itu, intervensi pelatihan/pendampingan yang bersifat kontekstual dan berkelanjutan menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kinerja aparatur desa.

**Peran Pendampingan dalam Meningkatkan Kualitas Penyusunan APBDes**

Pendampingan teknis yang terencana meliputi pelatihan praktik menyusun APBDes, simulasi penggunaan SISKEUDES, serta pendampingan saat musyawarah desa terbukti dapat mempercepat peningkatan kapasitas aparatur dan menurunkan kesalahan administrasi (Widiani & Musmini, 2024). Pendampingan idealnya bersifat partisipatif (melibatkan BPD dan masyarakat), adaptif (mengakomodir kondisi lokal), serta difokuskan pada transfer pengetahuan praktis agar perangkat desa tidak hanya mengerti prosedur, tetapi juga mampu menerapkannya secara mandiri di masa mendatang (Fadila & Pravitasari, 2025).

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## III. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Parhabinsaran Janjimatogu dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lokal lainnya, Desriadi. (2018). Adapun metode kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi Awal dan Koordinasi
   a) Melakukan kunjungan awal ke desa untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi sosial, ekonomi, dan administrasi keuangan desa.
   b) Mengadakan rapat koordinasi awal dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Tim Penyusun APBDes untuk menyepakati jadwal, pembagian tugas, dan ruang lingkup pendampingan.
2. Sosialisasi dan FGD (Focus Group Discussion)
   a) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan, regulasi, dan pedoman penyusunan APBDes sesuai Permendagri terbaru dan kebijakan daerah (Kabupaten Toba).
   b) Mengadakan FGD untuk menjaring masukan dari masyarakat dan lembaga desa terkait prioritas kebutuhan pembangunan, pembiayaan, serta potensi pendapatan asli desa.
3. Pemetaan Kebutuhan dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
   a) Membantu desa dalam melakukan pemetaan program dan kegiatan prioritas berbasis data hasil Musyawarah Desa (Musdes).
   b) Menyusun RKPDes sebagai dasar penyusunan APBDes, dengan menyesuaikan rencana kegiatan dengan kemampuan keuangan desa dan arah kebijakan pembangunan.
4. Pendampingan Teknis Penyusunan APBDes 2025
   a) Memberikan asistensi teknis dalam pengisian format APBDes sesuai dengan aplikasi Siskeudes dan pedoman penyusunan APBDes yang berlaku.
   b) Mengawal proses penganggaran mulai dari perencanaan kegiatan, penyusunan kode rekening, penetapan sumber pendanaan, hingga pengesahan dokumen APBDes oleh BPD.

**Pengumpulan Data**

1. Informasi Teknis: Kumpulkan informasi teknis terkait kegiatan, seperti gambar rencana, spesifikasi bahan, dan metode pelaksanaan.

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

2. Data Biaya: Kumpulkan data harga bahan, upah tenaga kerja, biaya transportasi, dan biaya lainnya yang relevan.
3. Sumber Dana: Pastikan sumber dana yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Awal Penyusunan APBDes di Desa Parhabinsaran Janjimatogu

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa perangkat desa masih mengalami kesulitan dalam Hasil observasi awal menunjukkan bahwa perangkat Desa Parhabinsaran Janjimatogu menghadapi sejumlah hambatan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hambatan tersebut terutama terletak pada aspek teknis penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), pemahaman regulasi yang mendasari penyusunan APBDes, serta mekanisme pembagian tugas di antara perangkat desa.

Kendala teknis terlihat dari masih sering terjadinya kesalahan input data pada aplikasi SISKEUDES. Sebagian perangkat desa belum terbiasa menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi, sehingga proses penyusunan APBDes membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan target yang ditentukan. Selain itu, ketidakselarasan dokumen keuangan dengan format standar yang berlaku juga menjadi masalah utama. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi berupa keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah.

Temuan awal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor dominan. Hal ini konsisten dengan temuan Harahap et al (2023)yang menyatakan bahwa implementasi SISKEUDES seringkali terhambat oleh kurangnya kompetensi teknis aparatur desa. Keterbatasan ini bukan hanya terkait dengan keterampilan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga dengan pemahaman atas prinsip-prinsip regulasi yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Demikian, kondisi awal menggambarkan bahwa perangkat desa masih berada pada tahap adaptasi, baik terhadap sistem informasi baru maupun terhadap tuntutan regulasi. Situasi ini menegaskan perlunya strategi pendampingan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memberikan pemahaman konseptual mengenai tata kelola keuangan desa yang baik.

### Proses Pendampingan Penyusunan APBDes

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Kegiatan pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur. Tahapan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang bersifat praktis sekaligus aplikatif, sehingga perangkat desa dapat menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh.

Tahapan pertama adalah pelatihan penggunaan aplikasi SISKEUDES. Pada tahap ini, perangkat desa diperkenalkan kembali dengan fungsi dasar aplikasi, seperti penginputan data, penyesuaian kode rekening, hingga pembuatan laporan otomatis. Pelatihan dilakukan dengan metode demonstrasi dan praktik langsung, sehingga peserta dapat memahami alur kerja sistem secara lebih jelas.

Tahapan kedua adalah pendampingan teknis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dokumen RKPDes merupakan dasar penting dalam penyusunan APBDes karena memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pendampingan pada tahap ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, sekaligus melatih perangkat desa dalam menyusun prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahapan ketiga adalah simulasi penyusunan dokumen APBDes secara kolaboratif. Melalui simulasi ini, perangkat desa dilatih untuk bekerja sama menyusun dokumen sesuai format dan regulasi yang berlaku. Pendekatan kolaboratif membantu menciptakan suasana belajar yang interaktif dan mengurangi ketergantungan pada satu atau dua orang perangkat yang lebih menguasai materi.

Proses pendampingan ini mencerminkan pendekatan learning by doing, di mana perangkat desa belajar secara langsung melalui praktik. Model ini sejalan dengan temuan Sinaga et al (2022) yang menekankan bahwa pendampingan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan teknis aparatur desa, terutama dalam menghadapi perubahan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi.

**Hasil Implementasi Pendampingan**

Setelah melalui rangkaian pendampingan, perangkat desa menunjukkan peningkatan kemampuan yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, kemampuan menggunakan aplikasi SISKEUDES mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

kesalahan input data serta semakin lancarnya perangkat desa dalam mengoperasikan fitur-fitur aplikasi.

Kedua, penyusunan dokumen APBDes menjadi lebih sistematis dan sesuai regulasi. Dokumen yang dihasilkan sudah mengikuti format standar dan dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini berbeda dengan kondisi awal di mana terdapat keterlambatan dan ketidaksesuaian dokumen.

Ketiga, perangkat desa mengalami peningkatan pemahaman terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kesadaran ini tercermin dalam praktik, misalnya melalui penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat desa dalam forum musyawarah.

Hasil ini sejalan dengan temuan Alfiani & Estiningrum (2021) serta Susano & Rachmawati (2024) yang menegaskan bahwa penerapan SISKEUDES berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, pendampingan tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan pemahaman nilai-nilai tata kelola yang baik.

**Tantangan dalam Pendampingan**

Meskipun terdapat peningkatan kapasitas, beberapa kendala masih ditemukan, seperti:

1. Keterbatasan perangkat komputer/laptop dan jaringan internet yang stabil.
2. Perbedaan kemampuan individu perangkat desa sehingga proses belajar tidak merata.
3. Masih diperlukan bimbingan lanjutan terkait aspek perencanaan pembangunan fisik dan non-fisik.

Kendala ini menguatkan hasil penelitian Widiani & Musmini (2024) bahwa keberhasilan implementasi SISKEUDES sangat dipengaruhi oleh dukungan sarana prasarana dan keberlanjutan pendampingan.

**Implikasi Temuan Penelitian**

Temuan penelitian ini memiliki implikasi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian mendukung pandangan bahwa pendampingan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa. Pendampingan tidak hanya

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

berfungsi sebagai transfer keterampilan teknis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan pemahaman normatif mengenai transparansi dan akuntabilitas.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait. Pertama, pemerintah daerah perlu menyediakan program pendampingan berkelanjutan agar perangkat desa tidak hanya mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga dapat mandiri dalam merencanakan dan menyusun APBDes. Kedua, perlu adanya peningkatan sarana penunjang, seperti penyediaan komputer, jaringan internet yang memadai, serta sistem pendukung lain yang relevan.

Dengan adanya dukungan tersebut, perangkat Desa Parhabinsaran Janjimatogu diharapkan dapat semakin mandiri dan profesional dalam mengelola keuangan desa. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan dalam proses penyusunan APBDes TA 2025 di Desa Parhabinsaran Janjimatogu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa, di mana penggunaan aplikasi SISKEUDES terbukti membantu penyusunan APBDes menjadi lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Pendampingan yang dilakukan juga berhasil meningkatkan pemahaman perangkat desa terkait regulasi, kemampuan administratif, serta keterampilan teknis dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, perbedaan kemampuan individu, serta kebutuhan bimbingan lanjutan terutama dalam aspek perencanaan pembangunan fisik dan non-fisik. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan pemanfaatan SISKEUDES melalui pelatihan lanjutan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta memperkuat sarana prasarana seperti perangkat teknologi dan jaringan internet. Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa model pendampingan partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa dan dapat menjadi dasar pengembangan teori mengenai hubungan antara pendampingan, literasi keuangan desa, dan kualitas pengelolaan APBDes dalam konteks digitalisasi pemerintahan desa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas kajian dengan membandingkan efektivitas pendampingan di berbagai desa dengan karakteristik berbeda,

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

serta mengkaji dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan masyarakat melalui implementasi APBDes yang transparan dan akuntabel.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(2), 222. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125

Anggun Puji Nur Fadila, & Dyah Pravitasari. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan, 2(3), 983–992. Atira andi, fitriana, syamsul. (2025). Implementasi Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(3), 1622–1629. https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7214

Roslinda Harahap, Fauzi Arif Lubis, & Rahmat Daim Harahap. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 3(4), 199–207. https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.876

Sinaga, A. R. L., Sihombing, M., & Humaizi, H. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes ) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Perspektif, 11(3), 1209–1218. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6429

Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 12(1), 50–58. https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382

Widiani, K., & Musmini, L. S. (2024). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Upaya Mendukung Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Bila. 14(2), 332–338.

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 